



RINGKASAN LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH (RLPPD) KOTA BANJAR TAHUN 2020

1. Latar Belakang

Puji dan syukur dipanjatkan kehadirat Allah SWT, karena atas rahmat dan hidayah-Nya Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (RLPPD) Kota Banjar Tahun 2020 ini dapat disusun dan selesai tepat waktu. Penyusunan Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (RLPPD) Kota Banjar Tahun 2020 merupakan implementasi dari pasal 22 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, yang menyebutkan bahwa Kepala Daerah menyampaikan RLPPD kepada masyarakat bersamaan dengan penyampaian LPPD kepada Pemerintah Pusat dan Kepala Daerah wajib memublikasikan RLPPD kepada masyarakat melalui media cetak dan/atau media elektronik.

Selanjutnya berdasarkan ketentuan pasal 23 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, bahwa RLPPD dipublikasikan paling sedikit melalui:

- a. 3 (tiga) media cetak harian dan/atau media *online*;
- b. Papan pengumuman yang mudah diakses publik; dan
- c. *Website* resmi pemerintah.

Kami menyadari sepenuhnya bahwa dalam penyajian baik secara substansi, redaksional maupun *outline* dalam laporan ini masih jauh dari kesempurnaan. Maka dari itu, demi terwujudnya penyajian yang lebih baik, diharapkan seluruh masyarakat, terkhusus masyarakat Kota Banjar dapat memberikan tanggapan atas RLPPD sebagai masukan perbaikan penyelenggaraan pemerintahan daerah pada masa mendatang.

Akhirnya kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh jajaran Pemerintah Daerah dan semua pihak yang telah membantu dan mendukung dalam kegiatan penyusunan RLPPD Kota Banjar Tahun 2020 ini, sehingga dapat disampaikan kepada tepat pada waktunya. Semoga RLPPD Kota Banjar

Tahun 2020 ini dapat bermanfaat dan dapat dijadikan referensi untuk perbaikan di masa yang akan datang.

2. Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (RLPPD) Kota Banjar Tahun 2020

A. Capaian kinerja makro

Capaian kinerja makro merupakan capaian kinerja yang menggambarkan keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah secara umum. Capaian kinerja makro dihasilkan dari berbagai program yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah, pemerintah pusat, pihak swasta dan pihak terkait lainnya dalam pembangunan Nasional. Laporan Kinerja Makro Pemerintah Kota Banjar Tahun 2019 dan Tahun 2020 serta perubahannya dapat dilihat dalam tabel di bawah:

Tabel 1.1
Capaian Indikator Kinerja Makro

No	Indikator Kinerja Makro	Capaian Kinerja Tahun N-1 (2019)	Capaian Kinerja Tahun N (2020)	Perubahan (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Indeks Pembangunan Manusia	71,75	71,70	-0,07
2	Angka Kemiskinan	5,50	6,09	10,73
3	Angka Pengangguran	6,10	6,73	10,33
4	Pertumbuhan Ekonomi	5,03	1,04	-79,32
5	Perdapatan Per Kapita	23,91	24,34	1,80
6	Ketimpangan Pendapatan (Ratio Gini)	0,410	0,412	0,49

Sumber : Bappeda Kota Banjar Tahun 2021

Perubahan capaian kinerja makro merupakan hasil dari capaian kinerja makro tahun pelaporan/Tahun 2020 dikurangi capaian kinerja makro tahun sebelumnya/Tahun 2019 dibagi capaian kinerja makro tahun sebelumnya/Tahun 2019 dikali 100%.

B. Ringkasan capaian kinerja urusan pelayanan dasar (pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan dan kawasan permukiman, sosial, ketentraman dan ketertiban)

1. Urusan Pendidikan

Urusan Pendidikan di Kota Banjar dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Adapun capaian penyelenggaraan IKK Outcome urusan pendidikan diukur oleh 4 IKK yaitu:

- 1) Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD yaitu **81,87%**
- 2) Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar yaitu **94,89%**
- 3) Tingkat partisipasi warga negara usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah pertama yaitu **94,32%**
- 4) Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan yaitu **93,33%**

2. Urusan Kesehatan

Urusan Kesehatan di Kota Banjar dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan. Adapun capaian penyelenggaraan IKK Outcome urusan kesehatan diukur oleh 14 IKK yaitu:

- 1) Rasio daya tampung RS terhadap Jumlah Penduduk yaitu **2,33 per 1000 penduduk**
- 2) Persentase RS Rujukan Tingkat Kabupaten/Kota yang terakreditasi yaitu **100%**
- 3) Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil yaitu **99,52%**
- 4) Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan yaitu **99,73%**
- 5) Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir yaitu **100,03%**
- 6) Presentase pelayanan kesehatan balita sesuai standar yaitu **98,93%**
- 7) Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar yaitu **98,02%**
- 8) Persentase orang usia 15-59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar yaitu **23,45%** capaian rendah dikarenakan Akibat Pandemi Covid-19 Kegiatan pelayanan UKBM (Posbindu PTM) selama semester 1 tahun 2020 tidak ada kegiatan, kemudian pada semester 2 pelayanan UKBM kembali berjalan dengan pembatasan protokol kesehatan. Kunjungan ke Puskesmas terjadi penurunan yang signifikan akibat Pandemi Covid-19
- 9) Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar yaitu **24,35%** capaian rendah karena kegiatan UKBM /Posyandu lansia tidak dilaksanakan secara optimal karena ada pembatasan kegiatan sehubungan dengan pandemi covid - 19

- 10) Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar yaitu **23,23%**, capaian rendah karena kurangnya kepatuhan dan kesadaran penderita hipertensi untuk pemeriksaan dan pengobatan secara rutin dan teratur, serta belum semua pelayanan hipertensi di Faskes Swasta masuk pencatatan dan pelaporan
- 11) Persentase penderita Diabetes Melitus yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar yaitu **49,42%** capaian rendah karena kurangnya kepatuhan dan kesadaran penderita Diabetes untuk pemeriksaan dan pengobatan secara rutin dan teratur
- 12) Persentase Orang Dengan Gangguan Jiwa berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar yaitu **105,90%**
- 13) Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar yaitu **60,51%**
- 14) Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar yaitu **74,16%**

3. Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang di Kota Banjar dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman. Adapun capaian penyelenggaraan IKK Outcome Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang diukur oleh 8 IKK yaitu:

- 1) Rasio luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS Kewenangan Kota yaitu **0%** karena di Kota Banjar tidak ada kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di Wilayah Sungai kewenangan kota
- 2) Rasio luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi, erosi, dan akresi yang terlindungi oleh infrastruktur pengaman pantai di WS Kewenangan Kota yaitu **0%** karena di Kota Banjar tidak ada kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi, erosi, dan akresi yang terlindungi oleh infrastruktur pengaman pantai di Wilayah Sungai kewenangan kota
- 3) Rasio luas daerah irigasi kewenangan kota yang dilayani oleh jaringan irigasi yaitu **30,75%**
- 4) Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan

perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kota yaitu **84,04%**

- 5) Persentase jumlah rumah yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik yaitu **83,50%**
- 6) Rasio kepatuhan IMB kota yaitu **100%**
- 7) Tingkat Kemantapan Jalan kota yaitu **85,30%**
- 8) Rasio tenaga operator/teknisi/analisis yang memiliki sertifikat kompetensi yaitu **88,75%**

4. Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman di Kota Banjar dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman dan BPBD. Adapun capaian penyelenggaraan IKK Outcome Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang diukur oleh 5 IKK yaitu:

- 1) Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana kota yaitu **100%**
- 2) Fasilitasi penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terdampak relokasi program pemerintah kabupaten/kota yaitu **0%** karena Pemerintah Kota Banjar pada Tahun 2020 tidak memiliki program relokasi dan Dinas PUPRPKP sudah melakukan pendataan perumahan pada lokasi yang berpotensi menimbulkan bahaya, perumahan pada lahan bukan fungsi permukiman dan relokasi masyarakat yang terkena program Pemerintah Kota Banjar, sehingga tidak ada rumah yang harus mendapat fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni.
- 3) Persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha di kota yang ditangani yaitu **0%** karena pada Tahun 2020 sesuai berita Acara Kesepakatan perhitungan dan penetapan pengurangan luasan kawasan kumuh tingkat kota/kabupaten, menyatakan bahwa Kota Banjar sudah tidak memiliki sisa luasan kawasan kumuh
- 4) Berkurangnya jumlah unit RTLH (Rumah Tidak Layak Huni) yaitu **0,73%**
- 5) Jumlah Perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum) yaitu **50,84%**

5. Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

Urusan Trantibumlinmas di Kota Banjar dilaksanakan oleh Satpol PP dan BPBD. Adapun capaian penyelenggaraan IKK Outcome Urusan Trantibumlinmas diukur oleh 7 IKK.

- 1) Persentase Gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan yaitu **100%**
- 2) Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan yaitu **100%**
- 3) Persentase warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana yaitu sebanyak 294 orang atau **100%**
- 4) Persentase warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana yaitu sebanyak 250 orang atau **100%**
- 5) Persentase warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana yaitu sebanyak 3.757 orang atau **100%**
- 6) Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana yaitu **100%**
- 7) Waktu tanggap (response time) penanganan kebakaran yaitu **19,56 menit/kejadian**

6. Urusan Sosial

Urusan Sosial di Kota Banjar dilaksanakan oleh Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Adapun capaian penyelenggaraan IKK Outcome Urusan Sosial diukur oleh 2 IKK, yaitu sebagai berikut:

- 1) Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti (Indikator SPM) sebesar **98,55%**.
- 2) Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti (Indikator SPM) sebesar **100%**.

C. Hasil EPPD dan opini atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah tahun sebelumnya.

1. Hasil EPPD atas LPPD Pemerintah Kota Banjar:

- a. Hasil Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EPPD) atas Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kota Banjar Tahun 2018 yaitu dengan skor **3.4535** atau dengan Status Kinerja Sangat Tinggi

- b. Hasil Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EPPD) atas Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kota Banjar Tahun 2019 yaitu dengan skor **3,8289** atau dengan Status Prestasi Tinggi

2. Opini Atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

- a. Tahun 2019 mendapat Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)
- b. Tahun 2020 **belum keluar masih dalam proses penilaian**
- c. Opini Atas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Banjar selama 10 (sepuluh) tahun terakhir yaitu dari Tahun 2011 s/d Tahun 2020 adalah mendapat penghargaan WTP sebanyak 9 kali berturut-turut karena untuk opini tahun 2020 hasilnya belum keluar atau masih dalam proses penilaian.

D. Ringkasan penerimaan dan pengeluaran anggaran daerah

1. Penerimaan

- a. Pendapatan Daerah Tahun 2020 direncanakan sebesar Rp.788.068.964.061,00 dengan realisasi sebesar Rp.755.725.064.073,00 atau mencapai 95,90%
- b. Pendapatan Asli Daerah yang direncanakan sebesar Rp.124.880.110.565,00 dengan realisasi sebesar Rp. 119.424.581.099,00 atau sebesar 95,63%.
- c. Dana Perimbangan yang direncanakan sesuai dengan APBD tahun 2020 sebesar Rp.480.691.476.578,00 dengan penyerapan sebesar Rp.493.297.264.555,00 atau mencapai tingkat penyerapan sebesar 102,62%.
- d. Pendapatan Lain-lain daerah yang sah ditargetkan Rp.182.497.376.918,00 dengan realisasi sebesar Rp.143.003.218.419,00 atau sebesar 78,36%.
- e. Besaran Pendapat Asli Daerah (PAD) (Realisasi) Pemerintah Kota Banjar Tahun 2020 Rp.119.424.581.099,00 mencapai sebesar 15,80% jika dibandingkan dengan keseluruhan realisasi pendapatan daerah Kota Banjar tahun 2020 sebesar Rp.755.725.064.073,00.
- f. Rasio PAD terhadap jumlah PDRB non migas (harga berlaku) sebesar 0,03%.

2. Pengeluaran

- a. Total anggaran belanja dalam APBD Tahun 2020 sebesar Rp.815.203.085.479,00 dengan realisasi Belanja sebesar Rp.722.580.906.871,00 atau mencapai rasio 88,64%
- b. Total anggaran Belanja Tidak Langsung sebesar Rp.465.894.414.466,00 dengan realisasi sebesar Rp.420.053.843.809,00 atau sebesar 90,16%
- c. Total anggaran Belanja Langsung sebesar Rp.349.308.671.013,00 dengan realisasi sebesar Rp.302.527.063.062,00 atau sebesar 86,61%
- d. Alokasi realisasi belanja langsung sebesar Rp.302.527.063.062,00 atau mencapai 41,87% dari total realisasi belanja APBD Kota Banjar tahun 2020 sebesar Rp.722.580.906.871,00.
- e. Rasio Belanja Pegawai Di Luar Guru dan Tenaga Kesehatan terhadap jumlah realisasi APBD sebesar 18,87%
- f. Rasio Anggaran Sisa Terhadap Total Belanja Dalam APBD Tahun Sebelumnya 3,80%

Tabel 1.2

Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun 2020

NOMOR URUT	URAIAN	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI (UNAUDITED)	BERTAMBAH / (BERKURANG)	(%)
1	2	3	4	5	6
4	PENDAPATAN	788,068,964,061.00	755,725,064,073.00	(32,343,899,988.00)	95.90
4 . 1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	124,880,110,565.00	119,424,581,099.00	(5,455,529,466.00)	95.63
4 . 1 . 1	Pendapatan Pajak Daerah	14,447,513,165.00	15,152,776,452.00	705,263,287.00	104.88
4 . 1 . 2	Hasil Retribusi Daerah	3,173,816,869.00	3,484,797,151.00	310,980,282.00	109.80
4 . 1 . 3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	3,854,820,000.00	3,854,820,000.00	0.00	100.00
4 . 1 . 4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	103,403,960,531.00	96,932,187,496.00	(6,471,773,035.00)	93.74
4 . 2	DANA PERIMBANGAN	480,691,476,578.00	493,297,264,555.00	12,605,787,977.00	102.62
4 . 2 . 1	Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	57,144,192,000.00	72,402,654,895.00	15,258,462,895.00	126.70
4 . 2 . 2	Dana Alokasi Umum	353,432,625,000.00	351,736,779,000.00	(1,695,846,000.00)	99.52
4 . 2 . 3	Dana Alokasi Khusus	70,114,659,578.00	69,157,830,660.00	(956,828,918.00)	98.64
4 . 3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	182,497,376,918.00	143,003,218,419.00	(39,494,158,499.00)	78.36
4 . 3 . 1	Pendapatan Hibah	19,375,175,463.00	19,375,175,463.00	0.00	100.00
4 . 3 . 3	Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	31,038,016,955.00	27,820,975,613.00	(3,217,041,342.00)	89.64

NOMOR URUT	URAIAN	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI (UNAUDITED)	BERTAMBAH / (BERKURANG)	(%)
1	2	3	4	5	6
4.3.4	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	77,520,637,000.00	77,520,637,000.00	0.00	100.00
4.3.5	Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	31,298,318,500.00	18,286,430,343.00	(13,011,888,157.00)	58.43
4.3.6	Pendapatan Lainnya	23,265,229,000.00	0.00	(23,265,229,000.00)	0.00
5	BELANJA	815,203,085,479.00	722,580,906,871.00	(92,622,178,608.00)	88.64
5.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	465,894,414,466.00	420,053,843,809.00	(45,840,570,657.00)	90.16
5.1.1	Belanja Pegawai	319,183,950,126.80	302,728,026,500.00	(16,455,923,626.80)	94.84
5.1.4	Belanja Hibah	12,950,945,000.00	11,775,650,000.00	(1,175,295,000.00)	90.93
5.1.5	Belanja Bantuan Sosial	3,311,800,000.00	3,206,927,746.00	(104,872,254.00)	96.83
5.1.6	Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa	2,022,891,000.00	1,737,578,500.00	(285,312,500.00)	85.90
5.1.7	Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota, Pemerintahan Desa dan Partai Politik	65,583,995,448.00	42,296,766,445.00	(23,287,229,003.00)	64.49
5.1.8	Belanja Tidak Terduga	62,840,832,891.20	58,308,894,618.00	(4,531,938,273.20)	92.79
5.2	BELANJA LANGSUNG	349,308,671,013.00	302,527,063,062.00	(46,781,607,951.00)	86.61
5.2.1	Belanja Pegawai	40,043,409,700.60	33,754,374,533.00	(6,289,035,167.60)	84.29
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	232,480,849,343.40	211,350,148,271.00	(21,130,701,072.40)	90.91
5.2.3	Belanja Modal	76,784,411,969.00	57,422,540,258.00	(19,361,871,711.00)	74.78
	SURPLUS / (DEFISIT)	(27,134,121,418.00)	33,144,157,202.00	60,278,278,620.00	(122.15)
6	PEMBIAYAAN DAERAH				
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH	32,471,529,718.00	49,411,878,359.00	16,940,348,641.00	152.17
6.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	32,471,529,718.00	32,471,529,718.00	0.00	100.00
6.1.4	Penerimaan Pinjaman Daerah	0.00	16,940,348,641.00	16,940,348,641.00	#DIV/0!
6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH	5,337,408,300.00	22,277,756,941.00	16,940,348,641.00	417.39
6.2.2	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!
6.2.3	Pembayaran Pokok Utang	5,337,408,300.00	22,277,756,941.00	16,940,348,641.00	417.39
	PEMBIAYAAN NETTO	27,134,121,418.00	27,134,121,418.00	0.00	100.00
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN	0.00	60,278,278,620.00	60,278,278,620.00	#DIV/0!

Sumber : BPPKAD Kota Banjar

E. Inovasi Daerah

Inovasi Daerah Pemerintah Kota Banjar dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yaitu sebagai berikut:

Fokus Pertama yaitu mengenai Penghargaan yang diterima Pemerintah Kota Banjar tahun 2020 yaitu sebanyak 8 Penghargaan sebagai berikut:

1. Pemerintah Kota Banjar meraih nilai “B” untuk Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Intansi Pemerintah (SAKIP) tahun 2019 dari Kemenpan RB, dimana terjadi kenaikan nilai Sakip dari 63 ditahun 2018 menjadi 67 ditahun 2019, Wakil Wali Kota Banjar, H. Nana Suryana menerima secara langsung “Sakip Award 2019” dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Tjahyo Kumolo pada acara Penyerahan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Intansi Pemerintah Kabupaten/ Kota Regional Wilayah I, di Batam Kepulauan Riau pada Tanggal, 10 Februari 2020.
2. Kota Banjar kembali raih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI Perwakilan Jawa Barat atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun anggaran 2019. Opini tertinggi kali ini merupakan pencapaian kesebelas kali yang diraih Kota Banjar. Penyerahan Laporan Hasil Penilaian (LHP) dilakukan oleh Kepala BPK Perwakilan Jawa Barat melalui video conference (vidcon) dengan Wali Kota Banjar di ruang Sekretariat Covid Center Pendopo Kota Banjar, Kamis, 25 Juni 2020.
3. Pemerintah Kota Banjar kembali meraih penghargaan di Bidang Kesehatan sebagai Kota Sehat (Swasti Saba) Wistara Tahun 2019. Predikat Swasti Saba Wistara merupakan predikat tertinggi untuk sebuah kota sehat dari Kementerian Kesehatan. Penghargaan ini diberikan kepada 17 Kabupaten/Kota di Jawa Barat atas kepedulian, dukungan, keberpihakan pemerintah daerah serta terjalinnya sinergitas diantara seluruh warga dalam meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat di daerahnya masing-masing. wujud apresiasi atas prestasi tersebut dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat, melalui Biro Pelayanan Sosial dan Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat, yang diserahkan secara simbolik oleh Wakil Gubernur Jawa Barat., Uu Ruzhanul Ulum secara langsung kepada Wali Kota Banjar, Dr. Hj. Ade Uu Sukaesih, M.Si., yang bertempat di Pusat Dakwah Islam (PUSDAI), Bandung, Selasa, 29 September 2020.
4. Kota Banjar raih Bank Indonesia award 2020 yaitu sebagai pemda terdepan dalam implementasi Electronic Trading Platform (ETC), yang

diserahkan oleh Kepala BI Tasikmalaya kepada Wali Kota Banjar pada tanggal 8 Desember 2020

5. Kota Banjar mendapat Juara Harapan II Kota Pendukung Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) dalam ajang PKH Gumira Tingkat Provinsi Jawa Barat Tahun 2020. Penghargaan ini dilaksanakan di Bandung pada hari Sabtu tanggal 19 Desember 2020
6. Puskesmas Banjar 3 Kota Banjar mendapatkan predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) serta Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB). Penghargaan ini diberikan oleh Menteri PANRB Tjahjo Kumolo, Senin, 21 Desember 2020 secara Virtual, pada rangkaian peringatan Hari Anti-Korupsi Sedunia. Dimana untuk Kota Banjar mengikuti acara tersebut secara virtual dan dihadiri oleh Wali Kota Banjar, Sekretaris Daerah, Kadis Kesehatan dan Kepala Puskesmas Banjar 3, bertempat di Ruang Covid Center. “Kegiatan ini dimaksudkan agar momentum Hari Anti Korupsi Sedunia bisa menjadi pemicu bagi seluruh instansi pemerintah untuk melakukan aksi pencegahan dan pemberantasan korupsi secara kongkrit, sistematis, dan berkelanjutan melalui penerapan program reformasi birokrasi yang telah ditetapkan,” ujar Menpan.
7. Kota Banjar Raih Penghargaan Dari Kemenkeu atas Raihan Opini WTP atas LKPD Tahun 2019. Pemerintah Kota Banjar kembali menerima penghargaan dari Kementerian Keuangan yang disampaikan langsung oleh Menteri Keuangan RI, Sri Mulyani secara virtual zoom, Kamis, 17 Desember 2020. Kota Banjar meraih dua kategori penghargaan dari Kemenkeu yaitu yang pertama penghargaan atas pencapaian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun 2019 yang berhasil meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dan penghargaan atas raihan WTP secara berturut-turut, dimana Kota Banjar sendiri telah meraih 11 kali WTP.
8. Wali Kota mendapatkan Penghargaan dari Forum sadar hukum Provinsi Jawa Barat sebagai pembina terbaik forum pelajar sadar hukum kota banjar pada bulan desember 2020, dan forum pelajar sadaar hukum Kota Banjar juga mendapat penghaargaan.

Fokus Kedua adalah mengenai daya saing daerah yang diukur dengan peningkatan investasi di Kota Banjar yaitu untuk total investasi di Kota Banjar Tahun 2019 adalah sebesar Rp. 262.981.421.529,00, sedangkan Tahun 2020 sebesar Rp. 159.704.277.122,00 sehingga

persentase peningkatan investasi di Kota Banjar terjadi penurunan sebesar 39,27%.

Demikian Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (RLPPD) Kota Banjar Tahun 2020 yang dapat disampaikan, terima kasih atas segala perhatiannya.

Banjar, 23 Maret 2021

WALI KOTA BANJAR

TTD

Dr. Hj. ADE UU SUKAESIH, M.Si